

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI (Studi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Probolinggo)

Rofiatul Maghfiroh¹, Nurul Umi Ati², Sunariyanto³

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: rofiatulmaghfiroh9@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya isu atau fenomena tentang menurunnya kesejahteraan petani yang diakibatkan oleh langkanya pupuk subsidi pada tahun 2020. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian mengeluarkan kebijakan publik bentuk program peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian, peningkatan program dan informasi penyuluhan, dan pengembangan agribisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani beserta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Untuk mengetahuinya digunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran implementasi kebijakan berupa program Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) yang sudah diterapkan. Serta, pemberian pupuk subsidi, benih tanaman dan alat pertanian juga sudah terealisasi. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petanian adalah communication, resource dan sarana prasarana, pemodalannya petani, dan jumlah produksi. Faktor penghambat implementasi kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kesejahteraan petanian sumber daya manusia, iklim dan cuaca, berkurangnya luas lahan, teknologi dan sarana prasarana, serta harga komoditi pasar.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo, Kesejahteraan

Pendahuluan

Menurut Dabukke (2014, p. 90) dalam konteks global, Jepang memperoleh pendapatan kotor tertinggi dari hasil pertanian sekitar USD44.045. angka ini berada jauh dibandingkan dengan India, Thailand bahkan Indonesia, dimana Thailand hanya mampu memperoleh sekitar USD1.136 dari usaha pertanian, selanjutnya diikuti oleh India dan Indonesia yang memperoleh sekitar USD981 dan USD672 per tahun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perolehan penghasilan dari sector pertanian di Indonesia relative rendah jika dibandingkan dengan negara Jepang, India dan Thailand. Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor pertanian.

Namun, di Indonesia sendiri masih banyak petani yang belum mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Bahkan, masih dirugikan karena pendapatan mereka yang sangat minim. Melonjaknya harga pangan saat ini terutama beras ada kaitannya

dengan nilai yang harus dibayar oleh petani, dimana jumlahnya lebih tinggi daripada jumlah yang diterima oleh petani. Kabupaten Probolinggo sendiri merupakan daerah pertanian karena mayoritas penduduknya adalah seorang petani subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Namun, masih banyak petani yang belum mendapat kesejahteraan disebabkan oleh langkanya pupuk urea subsidi menyebabkan pupuk urea menjadi mahal (Jatimtimes.com, 28 September 2020).

Faktor lainnya yaitu, semakin kecil lahan yang mereka kerjakan maka semakin kecil pula pendapatan yang akan diterima oleh keluarga petani. Faktor lainnya yaitu, semakin kecil lahan yang mereka kerjakan maka semakin kecil pula pendapatan yang akan diterima oleh keluarga petani. Peranan sector pertanian bagi kehidupan masyarakat di pedesaan sangat ditentukan oleh luas lahan pertanian. Dalam hal ini, lahan pertanian dalam usaha

tani merupakan faktor produksi utama dalam menyerap tenaga kerja dan sumber pendapatan petani. Sehingga, tinggi rendahnya tenaga kerja dan pendapatan petani akan ditentukan oleh luas lahan pertanian yang dikuasai dan dikerjakan.

Keterlibatan tenaga kerja pedesaan di sector informal ini antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan sector pertanian dalam menyerap tenaga kerja yang kian bertambah, jumlah luas lahan garapan yang tidak merata serta insentif yang di bidang pertanian yang tidak menguntungkan dalam meningkatkan pendapatan. Sehingga, mengharuskan tenaga kerja di sector pertanian untuk bisa mempertahankan kehidupan keluarganya sehari-hari.

Dengan demikian, agar terciptanya kesejahteraan kehidupan para petani dan keluarga diperlukan campur tangan dari Pemerintah terutama Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian. Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar memiliki kehidupan yang layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan petani sendiri juga dipengaruhi oleh penerapan teknologi pertanian. Penerapan teknologi pertanian sendiri ditandai dengan penerapan Revitalisasi Pertanian dari kelembagaan, budidaya, pasca panen, hingga pemasaran. Menurut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (2017), kebijakan pemerintah masih terhambat karena kelembagaan kelompok tani yang masih lemah sehingga belum memberikan peran untuk meningkatkan kesejahteraan petani. (Sumber: LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Pemerintah Kabupaten Probolinggo 2019)

Dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang bertanggungjawab untuk menyediakan atau mengelola prasarana pertanian adalah Pemerintah dan Daerah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Disamping itu, Pemerintah Pusat dan Daerah juga berperan dalam membina petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani dalam menghasilkan sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas. Selain itu dalam UU No.19 Tahun 2013 BAB IV Tentang Perlindungan Petani Bagian Satu Umum Pasal 21 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakal ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan.

Tinjauan Pustaka

Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Riant Nugroho (dalam Jefri Sulistiyanto: 2013:19) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan. Dalam proses penyusunan kebijakan sudah didasarkan pada kebutuhan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya.

Rasionalitas sendiri merupakan perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai dengan menekankan pada aspek efisiensi dan aspek ekonomis. Menurut Simon dalam (Dr. Sahya Anggara, 2014, pp. 72-82) model rasional menyimpulkan bahwa berbagai keputusan publik pada praktiknya tidak memaksimalkan manfaat atas beban, namun cenderung untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh para pengambil keputusan untuk diri pribadi dalam masalah yang sedang menjadi perhatian.

Dalam sasaran implementasi kebijakan, Menurut Grindle (1980), pada gilirannya keseluruhan implementasi kebijakan dapat dinilai dengan mengukur capaian *outcome* kebijakan yang dibandingkan dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, yakni yang disebut dengan *policy outcomes impact on society, individuals, and group in form of expected change*. Dalam teori George Edward III (dalam Jefri Sulistiyanto: 2013:22) mengemukakan bahwa untuk memperhatikan isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif ada empat faktor yang mempengaruhi yaitu *communication, disposition or attitude*, dan *bureaucratic structures*.

- a. *Communication*
- b. *Resource*
- c. *Disposition*
- d. *Bureaucratic structures*

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dalam Perda No.6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran dari PP 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ditetapkan uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Bupati nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo. Dalam BAB IV pasal 5 ayat 1

menjelaskan bahwa Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Kesejahteraan

Menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar memiliki kehidupan yang layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Ini menunjukkan bahwa sejahtera sebenarnya tidak hanya melulu pada kecukupan material saja, akan tetapi terpenuhinya juga unsur spiritual dan sosial dari seseorang. Untuk kesejahteraan petani sendiri bisa dilihat dari 6 aspek penilaian yakni:

1. Luas lahan garapan
2. Pemodal petani
3. Teknologi
4. Sumber daya manusia
5. Jumlah produksi
6. Harga komoditi pasar

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu metode yang memungkinkan untuk mengkaji hal-hal tertentu secara mendalam dan rinci.

Setting dan Subjek Penelitian

- a. Lokasi Penelitian
Peneliti memilih lokasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo
- b. Waktu penelitian
Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Desember sampai Februari 2021 dari tahap pra-survei hingga dilaksanakan tindakan.
- c. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pelaksanaan Penyuluhan Dan Bina Usaha Tani, Kasubag Umum Dan Kepegawaian serta Ketua Kelompok Tani

Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli yang memiliki informasi atau data tersebut. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh:
 - a. Mengadakan wawancara kepada Subbag Umum dan Kepegawaian yakni Ibu Endang

Dwi Sulistyowati, SP.,MM, Bapak Arif Kurniadi, SP., MM selaku Bidang Pelaksana Penyuluhan dan Bina Usaha Tani, serta Bapak Eddy selaku Ketua Kelompok Tani Jabung Subur II

- b. Pengamatan langsung terhadap objek penelitian (observasi).
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain yang telah disusun dan dipublikasikan. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari: literature, jurnal ilmiah dan berita digital.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah penting dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dibuat adalah data yang ditentukan dari tempat penelitian dan dianalisis secara kualitatif. dilakukan dengan melakukan observasi, selama pelaksanaan penelitian dilapangan dan setelah selesai penelitian di lapangan. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh ke dalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami.

Teknik Keabsahan Hasil Penelitian

Dalam teknik keabsahan hasil penelitian penulis menggunakan beberapa usaha diantaranya sebagai berikut:

- a. Kepercayaan (*credibility*)
- b. Keteralihan (*transferability*)
- c. Ketergantungan (*dependability*)
- d. Kepastian (*confirmability*)

Alur Penelitian

Dalam alur penelitian ini dimulai dengan merumuskan masalah penelitian, kemudian melakukan studi literature dengan membaca hasil penelitian terdahulu dan beberapa buku yang mendukung data dengan wawancara (*depth interview*), dan observasi. Setelah melakukan pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah analisis *existing system* yakni proses pembuatan perencanaan

strategis secara paralel dengan analisis struktur dokumen perencanaan strategis di beberapa perguruan tinggi. Setelah pengumpulan data maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah analisis persamaan dan perbedaan proses serta struktur dokumen perencanaan strategis perguruan tinggi. Setelah analisis tersebut akan dihasilkan beberapa persamaan yang dibutuhkan untuk mengerjakan langkah selanjutnya, yaitu analisis sintesa untuk menentukan kriteria yang ideal untuk *framework* perencanaan strategis perguruan tinggi.

Pembahasan

Gambaran Implementasi Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani

1. Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Pada hasil penelitian, ditemukan bahwa gambaran implementasi kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berupa pemfokusan terhadap peningkatan produksi pertanian guna menghasilkan peroduk pertanian yang berkualitas dan memiliki daya saing di pasar global serta memiliki kualitas produk yang baik dan berkelanjutan. Sehingga turut andil dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam pembuatan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian tidak serta merta merancang, namun melihat kondisi yang ada dilapangan dan evaluasi di tahun sebelumnya. Sehingga muncul revitalisasi lahan yang dalam pelaksanaannya terdapat 7 aspek untuk mewujudkan peningkatan produksi pertanian.

Yang pertama, revitalisasi lahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas yang terkendala dengan masalah lahan karena lahan semakin kekurangan unsur mikro dan makro. Dengan cara, mengurangi penggunaan pupuk kimia dan beralih pada pupuk organik hasil produksi sendiri di Unit Pengolahan Pupuk Organik dengan harapan mampu membantu memperbaiki unsur tanah sehingga tanah bisa lebih produktif lagi.

Yang kedua, revitalisasi pembenihan dengan penggunaan benih-benih unggul dengan cara memperkuat UPT produksi benih. Dengan penggunaan benih unggulan ini, pemerintah mengharapkan hasil panen yang maksimal dan berkualitas. Yang ketiga, revitalisasi infrastruktur dan sarana dengan memberikan bantuan peralatan pertanian, membangun dan merehabilitasi prasarana penyedia air irigasi, serta memfasilitasi pembangunan gudang-gudang penyimpanan hasil panen dan gudang benih penangkaran. Hal ini dimaksudkan mampu

memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan kemudahan di sector pertanian, selain itu mampu membantu dalam perekonomian petani sehingga petani sejahtera.

Yang ke empat, revitalisasi sumber daya manusia dengan mengedepankan kemampuan dari penyuluh pertanian dalam memberikan pelatihan kepada pejabat pelaksana dan pejabat fungsional guna meningkatkan kompetensi, mengatur tata hubungan kerja masing-masing individu guna melaksanakan kewajiban dalam mencapai kinerja yang maksimal, menyediakan informasi dan teknologi pertanian melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), serta menyusun SOP bagi kerja kelompok masyarakat pertanian dalam melaksanakan program pemerintah.

Yang ke lima, revitalisasi pembiayaan petani dengan menjalankan program Kementrian Pertanian berupa kartu tani ini, diharapkan mampu membantu para petani untuk menembus pupuk subsidi dan mendapatkan modal untuk panen berikutnya. Yang ke enam, kelembagaan petani dengan membantu kelompok tani melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) memberikan pelatihan dalam bidang administrasi agar lebih tertata seperti penulisan laporan, evaluasi dan pembukuan lainnya.

Yang ke tujuh, Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir dengan mengembangkan teknologi pertanian, meningkatkan alat mesin, melakukan kerjasama dalam mengembangkan teknologi pertanian, meningkatkan penggunaan teknologi pasca panen, terutama penyimpanan komoditi hortikultura agar bertahan lebih lama dan mampu menaikkan nilai tawar petani hortikultura, dan meningkatkan promosi komoditi Kabupaten Probolinggo Unggul.

2. Program kebijakan kesejahteraan petani

Pada hasil penelitian ditemukan bahwa dari kebijakan yang dibuat oleh Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian ini sudah dirancang melalui beberapa program kegiatan yang masuk di dalam rencana strategis yang dibuat berdasarkan pedoman Permendagri No.86 Tahun 2017. Terdapat 3 program yang diusung oleh bagian pelaksana penyuluhan dan bina usaha tani dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian, peningkatan program dan informasi penyuluhan, dan pengembangan agribisnis.

Dari ketiga program tersebut sudah menggambarkan bahwa pemerintah memfokuskan terhadap peningkatan produksi pertanian guna menghasilkan peroduk pertanian yang berkualitas dan memiliki daya saing di

pasar global serta memiliki kualitas produk yang baik dan berkelanjutan. Sehingga turut andil dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

3. Model kebijakan kesejahteraan petani

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa model kebijakan yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo menggunakan model rasional komprehensif dimana dalam merumuskannya tidak memaksimalkan manfaat atas beban. Namun, cenderung untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh para pengambil keputusan untuk diri pribadi dalam masalah yang sedang menjadi perhatian.

4. Sasaran kebijakan kesejahteraan petani

Dari hasil penelitian sasaran dari implementasi kebijakan yang dibuat oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kesejahteraan petani yakni meningkatkan produksi sub sector tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan. Angka produksi dalam bidang pertanian menunjukan kinerja secara keseluruhan. Jika suatu komoditi mengalami kenaikan produksi atau luas tanam maka bisa diartikan sebagai ekspektasi kenaikan kesejahteraan petani begitu juga sebaliknya. Jika kenaikan produksi menyebabkan petani mempunyai kelebihan pendapatan sebagai modal untuk tanam musim berikutnya ini akan berdampak pada kesejahteraan petani yang mampu mencukupi kebutuhan budidaya serta kebutuhan hidup.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Dari hasil penelitian ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo dalam mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam implementasi kebijakan pasti membutuhkan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi berjalannya suatu kebijakan.

1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Berdasarkan hasil penelitian dalam implementasi kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani terdapat faktor

pendukung diantaranya komunikasi dan koordinasi antara pegawai dinas sudah bisa dikatakan cukup baik. Sumber daya dan sarana prasarana yang memadai yakni dengan peningkatan pengetahuan petugas dengan mengikuti pembelajaran melalui diklat sehingga sumber daya manusianya berkualitas dan dapat mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki kepada kelompok tani.

Lalu fasilitas berupa sarana prasarana, UPPO, blower benih tembakau, traktor, dan peralatan pertanian lainnya. Dinas juga menjalankan program dari kementerian pertanian berupa kartu tani yang dapat digunakan untuk penyesuaian pupuk subsidi dan pendapatan modal pasca panen. Peningkatan jumlah produksi di beberapa hasil pertanian sehingga mampu membantu peningkatan pendapatan petani.

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Berdasarkan hasil penelitian dalam implementasi kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani terdapat faktor penghambat diantaranya Sumber Daya Manusia, petani masih belum bisa terbuka dan menerima terhadap beberapa program yang dibuat oleh dinas karena merasa khawatir pekerjaan mereka akan hilang karena tergantikan oleh mesin canggih, lalu iklim dan cuaca yang susah ditebak sehingga berpengaruh terhadap hasil pertanian yang berdampak pada nilai jual nantinya, alih fungsi lahan yang berakibat berkurangnya lahan pertanian menjadi lahan bisnis, sarana prasarana yang tidak sesuai pada saat pendistribusiannya atau maknanya alat pertanian karena petani tidak mampu memperbaiki serta pendistribusian benih yang tidak tepat atau kualitas kurang baik, serta harga komoditi pasar yang tidak menentu diakibatkan oleh tingginya kebutuhan para petani sehingga dalam penjualan hasil pertanian digunakan sistem kesepakatan antara penjual dan pembeli dan tidak berpatok pada harga dari pemerintah pusat.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo bisa dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari 3 program yang dihasilkan oleh bagian pelaksana penyuluhan dan bina usaha tani dan berfokus pada peningkatan hasil pertanian, yakni peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian, peningkatan program dan informasi penyuluhan, dan pengembangan agribisnis.
- b. Program dari kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kesejahteraan petani, yaitu dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian, peningkatan program dan informasi penyuluhan, dan pengembangan agribisnis.
- c. Model dari kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo disusun berdasarkan dari kebutuhan dan perencanaan yang diusulkan oleh kelompok tani yang sudah melalui persetujuan dari pusat di tahun sebelumnya.
- d. Sasaran dari kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo berupa peningkatan produksi pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan petani, terhitung hasil beberapa hasil produksi tanaman mengalami peningkatan.
- e. Faktor pendukung implementasi kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kesejahteraan petani adalah *communication*, *resource* dan sarana prasarana, pemodal petani, dan jumlah produksi.
- f. Faktor penghambat implementasi kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kesejahteraan pertanian sumber daya manusia, iklim dan cuaca, berkurangnya luas lahan, teknologi dan sarana prasarana, serta harga komoditi pasar.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan khususnya dalam mensejahterakan petani harus dilakukan dengan baik dan optimal, supaya sesuai dengan sasaran. Berikut beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti:

- a. Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian seharusnya mampu melakukan pendekatan lebih kepada para petani guna meningkatkan kepercayaan petani dengan memberikan jaminan dari kebijakan yang dibuat oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo.

- b. Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian seharusnya bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu pada sarana prasarana yang akan disalurkan pada kelompok tani di 24 kecamatan.
- c. Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian seharusnya mampu mengedepankan adaptasi dan melakukan mitigasi iklim guna meminimalisir adanya perubahan iklim.
- d. Pada masyarakat seharusnya mampu mengikuti laju perkembangan jaman dengan turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui kelompok tani.

Daftar Pustaka

- Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya, 2012.
- Prasojo, Lantip Diat. *Buku Manajemen Strategi*. Yogyakarta: UNY Press, 2018.
- Hayat. *Kebijakan Publik*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Dr. Sahya Anggara, M. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional*. Surabaya: PT Revka Petra Media .
- Dunn, W. N. (n.d.). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2013. *Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani*. Lembaran Negara RI Tahun 2013. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Kabupaten Probolinggo Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian *Rencana Strategis Tahun Anggaran 2019-2023*. (2019). Probolinggo.
- Pertanian, D. K. (2018). *Rencana Strategis TA 2014-2018*. Probolinggo: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian .
- Pertanian, D. K. (2020). *Rancangan Rencana Kerja DKP2*. Probolinggo: Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian.
- Pertanian, D. K. (2018). *Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2017-2018*. Probolinggo: Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian.
- Probolinggo, D. K. (2020). *LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun Anggaran 2019*. Probolinggo: Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian .
- Ir. H. Ahmad Hasyim Ashari, M. (2017). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017*. LKJIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo, Hal 73-76.

- Sudalmi, Endang Sri. "Pembangunan Pertanian Berkelanjutan ." Jurnal Inovasi Pertanian Vol 9 No.2 , 2010: 18.
- Hermanto, Bambang. "Model Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Kubis (*Brassica Oleraciae*) Dataran Tinggi Pada Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara." 2019: Halaman 893-900.
- ANGGRAENI, I. G. (2016). Kebijakan Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani. 26.
- Asih, Y. D. (2018). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi .
- Susilowati, S. H. (2016). Fenomena Penuaan Petani Dan Berkurangnya Tenaga Kerja Muda Serta Implikasinya Bagi Kebijakan Pembangunan Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 34, 46.
- Cahyono, B. (2014). Peran Modal Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau Di Kabupaten Wonosobo. Ekobis, Volume.15. No.1 Januari 2014, 1-16.
- Damanik, J. A. (2014). Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi Di Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen . Economics Development Analysis Journal, Hal 214-224.
- M.R. Ridhanto, M. d. (2020). Strategi Pengembangan Agribisnis Kedelai Lokal Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani Di Kabupaten Lombok Tengah. Vol. 16. No.1.2020 Hal 23-35, Hal 23-35.
- Nugroho, S. A. (2014). Peran Kelompok Tani Sido Makmur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. Jurnal Teknik PWK Volume 3 Nomor 3, 516-517.
- Nuraini, N. (2013). Analisis kualitas hidup petani pangan di desa dringu kecamatan dringu kabupaten probolinggo.
- Pradipta, M. (2017). Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Padi Di Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. 10-11.
- Fadlurrahman, L. (2014). Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan. Kebijakan & Administrasi Publik, 18, 166-167.
- Rosanti, D. K. (2014). Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Jagung Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. JIIA, Volume 2. No. 1. Januari 2014, Hal 64-70.
- Pantjar Simatupang, d. (2016). Review dan Perumusan Indikator Kesejahteraan Petani. Laporan Akhir Kajian Isu-isu Aktual Kebijakan Pembangunan Pertanian T.A 2016, Hal 5-41.
- Sri Novi Yanti, S. d. (2014). Strategi Peningkatan Pendapatan Petani Padi Organik. Vol 3, No 4 (2014), 3.
- UA, A. A. (2017). Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ulujang Kecamatan Bontolempangan. Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 13, 143-144.
- Sujaya, D. H. (2018). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Produktivitas Usaha Tani Mina Padi Di Kota Tasikmalaya. Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis, 27.
- Mael, M. Y. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Program Padat Karya Pangan di Kecamatan Noemuti. Jurnal Agribisnis Lahan Kering , 48-49.
- Wardana, I. G. (2018). Pengaruh Luas Lahan, Alokasi Waktu Dan Produksi Petani Terhadap Pendapatan. E-Jurnal EP Unud, 2042.
- Surahman, E. (2020). Kajian Teori Dalam Penelitian . Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan Vol 3 No. 1 , 50.
- Zainuddin, Cut Muftia Keumala dan Zamzami. "Indikator Kesejahteraan Petani Melalui Nilai Tukar Petani (NTP) Dan Pembiayaan Syariah Sebagai Solusi." Jurnal Ekonomi Islam-Volume 9, Nomor 1 (2018), 2018: Hal 129-149.
- Muadi, S. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. Jurnal Review Politik.
- Sulistiyanto, J. (2013). Implementasi Kebijakan Light On Di Wilayah Kabupaten Bantul. 19.
- Adiratna, K. (2018). Pengaruh Luas Lahan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Padi Di Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. 2.
- Fadlurrahman, L. (2014). Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP, 18, 166-167.
- Hartati, G. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Petani Di Kota Denpasar. E-jurnal Ekonomi dan Bisnis, 1514.

- Simanjutak, M. (2009). *Tingkat Kepuasan Keluarga Berpendapatan Rendah Terhadap Sumberdaya Yang Dimiliki*. Ilm. Kel. dan Kons, 123.
- Kode, L. O. (2018). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Tentang Teknologi Informasi Pada Mutu Pelayanan Madrasah Aliyah Negeri 1 Muna*.
- Yuantari, C. M. (2016). *Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Pemasaran Hasil Pertanian Di Desa Curut Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah*. Techno.COM, 15, 44.
- Tewu, M. E. (2015). *Peranan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Aktivitas Kelompok Tani Di Desa Tember*. e-journal Acta Diurna, IV, 4.
- Kawa, Y. (2018). *Penetapan Harga Komoditi Hasil Pertanian Bagi Pedagang Di Pasar Tradisional Srengat Blitar Ditinjau Dari Teori Penetapan Harga Dalam Ekonomi Islam*. 19.
- Sofi, A. (2018). *Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*.
- Dabukke, F. B. (2014). *Kebijakan Pembangunan Pertanian Thailand, India, Dan Jepang Serta Implikasinya Bagi Indonesia. Analisis Kebijakan Pertanian*, 90.
- Mahsyar, A. (2018). *Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan Di Kabupaten Nunukan*. Jurnal Administrasi Publik, 154.
- Dinas Kominfo. 2010. Kondisi Geografis. <https://probolingkokab.go.id/kondisi-geografis/> (diakses, 04 Oktober 2020)
- BPS Kab. Probolinggo. 2020. Jumlah Penduduk Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010. <https://probolingkokab.bps.go.id/statictable/2020/09/01/941/jumlah-penduduk-berdasarkan-hasil-sensus-penduduk-2010.html>. (diakses, 04 Oktober 2020)
- SCRIBD. 2016. Definisi Kerangka Pikir. <https://www.scribd.com/doc/306634326/Definisi-Kerangka-Pikir> (27 November 2020)
- STATISTIKIAN. 2012. Penelitian Kualitatif. <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>. Diakses (27 November 2020)
- Tagar.Id Terbitan 16 September 2020
- Bhirawa Online Terbitan 17 September 2020
- JatimTimes.com Terbitan 28 September 2020
- Radar Bromo Terbitan 23 juni 2020